Jurnal Kritis Studi Hukum

Vol. 10 No. 6 Tahun 2025
Halaman 1-14

Peran Politik Abdul Muis dalam Volksraad (1916–1921) dan Dinamika Kebijakan Hindia Belanda pada Awal Abad ke-20

Candela Daffa Zundika[1], Achmad Maftuh Sujana[2], Siti Fauziyah[3]
daffacandela@gmail.com[1], achmad.maftuh@uinbanten.ac.id[2], siti.fauziyah@uinbanten.ac.id[3]
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam biografi Abdul Muis sebagai tokoh penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia, memahami kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-20, serta menganalisis bentuk dan peran politik Abdul Muis selama keterlibatannya dalam Volksraad pada tahun 1916–1921. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah dengan mengikuti lima tahapan: pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder yang dikritisi secara ketat untuk memastikan keaslian dan kredibilitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abdul Muis berperan signifikan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat pribumi, terutama dalam bidang pendidikan dan penghapusan kerja rodi, meskipun menghadapi tekanan kolonial. Selain itu, kebijakan Politik Etis pemerintah kolonial meskipun membawa beberapa manfaat, pada kenyataannya lebih banyak menguntungkan pihak kolonial dan gagal menciptakan perubahan sosial-ekonomi yang adil bagi rakyat Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa perjuangan Abdul Muis menjadi fondasi penting dalam membangun kesadaran nasionalisme menuju kemerdekaan Indonesia.

Kata Kunci: Abdul Muis, Volksraad, Politik Etis, Pergerakan Nasional, Hindia Belanda.

Abstract

This study aims to examine in depth the biography of Abdul Muis as a prominent figure in the history of Indonesia's national movement, to understand the political policies of the Dutch East Indies government in the early 20th century, and to analyze the political role and contributions of Abdul Muis during his involvement in the Volksraad from 1916 to 1921. The research employs the historical method, following five stages: topic selection, heuristics, verification, interpretation, and historiography. Data were collected from various primary and secondary sources, critically assessed to ensure their authenticity and credibility. The findings indicate that Abdul Muis played a significant role in advocating for the aspirations of the indigenous people, particularly in the fields of education and the abolition of forced labor, despite facing colonial repression. Moreover, while the Dutch Ethical Policy brought some benefits, in practice it largely favored the colonial authorities and failed to deliver equitable socio-economic change for the Indonesian people. This study highlights Abdul Muis's struggle as a foundational element in fostering national consciousness and paving the way toward Indonesian independence.

Keywords: *Abdul Muis, Volksraad, Ethical Policy, National Movement, Dutch East Indies.*

PENDAHULUAN

Penjajahan Hindia Belanda yang berlangsung sangat lama telah melahirkan sejumlah fase penting dalam sejarah bangsa Indonesia, salah satunya adalah munculnya masa pergerakan nasional. Fase ini menjadi momentum penting dalam sejarah kebangkitan bangsa Indonesia, karena mulai muncul kesadaran kolektif akan pentingnya kemerdekaan dan kedaulatan sebagai bangsa. Pergerakan nasional ini menumbuhkan rasa cinta tanah air dan mendorong masyarakat untuk bangkit dan berjuang melawan penjajahan demi kemerdekaan. Proses ini diawali oleh semangat para pemuda yang melakukan perlawanan dari skala kedaerahan hingga menjadi gerakan yang bersifat nasional.

Lahirnya pergerakan nasional tidak terlepas dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal muncul dari kesadaran akan penderitaan bersama yang dialami rakyat Indonesia akibat penjajahan Belanda. Sementara faktor eksternal dipengaruhi oleh kemunculan gerakan nasionalisme di negara-negara lain seperti India, Tiongkok, Filipina, dan Turki, yang kemudian menginspirasi pemuda Indonesia untuk membentuk organisasi-organisasi perjuangan yang bertujuan mencapai kemerdekaan.

Puncak dari semangat pergerakan nasional terjadi pada tahun 1928, ketika para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda. Dalam peristiwa ini, mereka menyatakan tekad untuk bersatu sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda menjadi simbol kuat dari kesadaran nasional dan keinginan untuk hidup bebas dan merdeka. Salah satu organisasi penting yang menjadi pelopor dalam gerakan nasional ini adalah Budi Utomo, yang didirikan pada tahun 1908 dan memicu lahirnya organisasi-organisasi pergerakan lainnya.

Kemunculan pergerakan nasional juga tidak bisa dilepaskan dari perubahan kebijakan politik Belanda pada awal abad ke-20, yang dikenal sebagai Politik Etis (Etische Politiek). Politik ini merupakan respons atas kritik dan tuntutan terhadap ketidakadilan sistem kolonial, serta bentuk keprihatinan sebagian kalangan Belanda terhadap kesejahteraan pribumi. Kebijakan ini secara resmi disampaikan oleh Ratu Wilhelmina dalam pidato kenegaraan pada tanggal 17 September 1901, yang menandai dimulainya era Politik Etis.

Salah satu implementasi penting dari Politik Etis adalah dalam bidang pendidikan. Pemerintah kolonial Belanda mulai membangun sekolah-sekolah bagi penduduk pribumi sebagai wujud dari kebijakan "balas budi". Dampak dari kebijakan ini cukup signifikan, ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi pendidikan, penurunan angka buta huruf, dan munculnya golongan terpelajar yang kelak menjadi motor penggerak pergerakan nasional. Sekolah-sekolah ini menjadi ruang awal bagi munculnya kesadaran kebangsaan dan organisasi pergerakan nasional.

Meningkatnya akses pendidikan melahirkan golongan intelektual dan terpelajar yang mulai mengkritisi sistem kolonial serta berupaya memperjuangkan nasib bangsa. Organisasi-organisasi nasionalis pun bermunculan, mulai dari yang bersifat kooperatif hingga radikal. Salah satu tonggak penting dari perkembangan ini adalah lahirnya Sarekat Islam, yang menjadi wadah perjuangan rakyat dan turut mendorong pembentukan lembaga perwakilan rakyat.

Dalam konteks inilah muncul gagasan pembentukan Volksraad (Dewan Rakyat), sebuah lembaga yang dimaksudkan untuk menampung aspirasi politik masyarakat pribumi. Kehadiran Volksraad merupakan hasil dari meningkatnya kesadaran politik rakyat akibat pendidikan yang diperoleh dari kebijakan Politik Etis.

Abdul Muis adalah salah satu tokoh penting dalam Volksraad dan menjadi perwakilan dari Sarekat Islam. Meskipun Volksraad hanya bersifat sebagai lembaga penasihat dan tidak memiliki kewenangan legislatif yang sejati, keberadaannya tetap dianggap sebagai langkah awal dalam perjuangan politik pribumi. Gagasan pembentukan Volksraad memicu perdebatan dalam berbagai organisasi nasional. Indische Partij, misalnya, mendukung pembentukannya, sementara ISDV (Indische Social Democratische Vereniging) menentangnya.

Perbedaan pendapat juga terjadi di tubuh Sarekat Islam. Tokoh seperti Abdul Muis mendukung keikutsertaan dalam Volksraad, dengan pertimbangan bahwa forum ini dapat digunakan untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat bumiputera. Namun, tokoh lain seperti Semaun dari cabang Semarang menolaknya karena menganggap Volksraad sebagai alat legitimasi kolonial. Akhirnya, Sarekat Islam memutuskan untuk bergabung dalam Volksraad, dan melalui perwakilannya seperti Abdul Muis dan Tjokroaminoto, mereka berupaya melakukan negosiasi dan kerja sama dalam forum tersebut.

Gagasan pembentukan Volksraad sebenarnya telah digagas dalam Kongres Sarekat Islam tahun 1916 di Bandung. Dalam kongres ini, Sarekat Islam secara resmi menyuarakan

tuntutan pembentukan pemerintahan otonom bagi rakyat Hindia Belanda. Kongres juga mengirim telegram kepada Ratu Wilhelmina sebagai bentuk tuntutan pembentukan dewan perwakilan rakyat. Perkembangan ideologi Sarekat Islam dalam kongres tersebut menunjukkan kemajuan kesadaran nasional menjadi kesadaran kebangsaan. Tuntutan akan pembentukan parlemen mencerminkan bahwa perjuangan politik tidak lagi terbatas pada kepentingan lokal atau sektoral, melainkan sudah mengarah pada cita-cita nasional untuk meraih kemerdekaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam biografi Abdul Muis sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia, memahami kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan pada awal abad ke-20, serta menganalisis bentuk dan peran politik yang dijalankan oleh Abdul Muis selama keterlibatannya dalam Volksraad pada tahun 1916–1921. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kontribusi Abdul Muis dalam memperjuangkan aspirasi rakyat Indonesia melalui lembaga perwakilan kolonial, serta meninjau bagaimana dinamika politik masa itu turut memengaruhi perkembangan nasionalisme dan kesadaran kebangsaan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian sejarah, karena objek kajian berupa peristiwa-peristiwa masa lampau yang terjadi antara tahun 1916–1921. Metode ini mengikuti lima tahapan sebagaimana dikemukakan oleh Kuntowijoyo, yaitu: pemilihan topik, heuristik, verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi . Tahap pemilihan topik dilakukan berdasarkan ketertarikan emosional penulis terhadap sosok Abdul Muis serta kesesuaian topik dengan kajian akademik yang pernah dipelajari dalam mata kuliah sejarah pergerakan nasional. Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber melalui studi pustaka, media elektronik, dan perpustakaan digital, dengan fokus pada buku-buku yang relevan tentang Abdul Muis, Sarekat Islam, dan sejarah pergerakan nasional.

Selanjutnya, pada tahap verifikasi, dilakukan kritik ekstern dan intern terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk menilai keaslian dan kredibilitasnya. Setelah itu, pada tahap interpretasi, penulis memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh, guna menghubungkan dan menyusun hubungan antarperistiwa secara logis dan bermakna. Terakhir, tahap historiografi dilakukan dengan menyusun hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan sejarah yang utuh, terdiri dari bagian pengantar, hasil penelitian, dan kesimpulan. Penulisan ini mempertimbangkan struktur naratif dan bahasa yang komunikatif agar dapat dipahami pembaca, serta mencerminkan kesadaran historis penulis dalam merekonstruksi peristiwa masa lalu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Abdul Muis

Abdul Muis lahir pada 3 Juli 1883 di Sungai Puar, Sumatera Barat. Ia dikenal sebagai seorang politikus, sastrawan, dan wartawan yang berperan penting dalam masa awal pergerakan nasional Indonesia pada awal abad ke-20. Ia merupakan anak dari pasangan Haji Abdul Gani dan seorang perempuan dari Koto Gedang yang masih memiliki darah keturunan Jawa, cucu dari Sentot Alibasyah Prawiradirjo, seorang panglima dalam Perang Diponegoro. Dari pihak ibunya, Abdul Muis juga memiliki garis keturunan dari tokoh ulama berpengaruh, Syekh Ahmad Khatib, serta memiliki hubungan keluarga dengan Haji Agus Salim, salah satu tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, Abdul Muis tidak sepenuhnya berdarah Minangkabau, melainkan merupakan perpaduan darah Minangkabau dan Jawa.

Keluarga Abdul Muis termasuk golongan terpandang. Ayahnya, Haji Abdul Gani, menjabat sebagai Tuanku Laras, kepala adat Minangkabau, serta memiliki usaha korek api dengan merek terkenal "Tuanku Laras Sungai Puar". Pada masa itu, Sumatera Barat berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda pasca kekalahan Tuanku Imam Bonjol dalam Perang

Paderi tahun 1837. Belanda sempat mengangkat penghulu-penghulu lokal, termasuk ayah Abdul Muis, sebagai perpanjangan tangan kekuasaan kolonial. Namun, sistem ini tidak berjalan efektif dan dihentikan pada tahun 1913.

Sejak kecil, Abdul Muis bersekolah di Europeesche Lagere School (ELS), sekolah khusus anak bangsawan, di mana ia dikenal sebagai siswa rajin dengan cita-cita mulia menjadi dokter agar dapat merawat orang tuanya. Setelah ELS, ia melanjutkan pendidikan ke STOVIA, sekolah kedokteran pribumi di Batavia, tempat ia mulai menyadari ketidakadilan kolonial dan pentingnya persatuan nasional melalui diskusi dengan sesama mahasiswa dari berbagai daerah.

Meskipun berasal dari keluarga terhormat dan dihormati oleh teman-teman sebayanya, Abdul Muis dikenal rendah hati dan mudah bergaul. Namun, ia juga memiliki sifat keras kepala, terutama ketika mempertahankan pendapatnya dalam diskusi. Ia bahkan tidak segan terlibat perkelahian jika keyakinannya dianggap salah. Hal ini membuat ayahnya menugaskan seorang "opas" (agen polisi) untuk mengawasinya. Kendati demikian, watak kerasnya menunjukkan semangatnya yang tinggi dalam membela kebenaran menurut pandangannya.

Pada usia tujuh tahun, Abdul Muis mulai menempuh pendidikan formal di Europeesche Lagere School (ELS), sebuah sekolah dasar khusus anak-anak dari kalangan bangsawan atau pejabat. Berkat jabatan ayahnya sebagai Tuanku Laras, Abdul Muis dapat diterima di sekolah ini. Selama di ELS, ia dikenal sebagai siswa yang rajin dan tekun. Ia tidak segan bertanya kepada guru jika belum memahami materi pelajaran. Ketika ditanya mengenai cita-citanya, Abdul Muis mengungkapkan keinginannya menjadi seorang dokter, bukan Tuanku Laras seperti ayahnya. Alasannya sederhana namun menyentuh: ia ingin bisa mengobati kedua orang tuanya jika suatu saat mereka sakit. Mendengar hal itu, ayahnya merasa bangga karena anaknya memiliki cita-cita mulia dan dapat mengangkat nama keluarga.

Setelah menyelesaikan pendidikan di ELS, Abdul Muis melanjutkan studinya ke STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen), sekolah kedokteran pribumi di Batavia. Di sana, ia bergaul dengan pemuda-pemuda dari berbagai daerah dan mulai menyadari kondisi rakyat yang sama-sama tertindas oleh penjajahan Belanda. Diskusi dengan sesama mahasiswa dari berbagai latar belakang membuka wawasan Abdul Muis mengenai pentingnya persatuan dan nasionalisme. Kesadaran akan kesamaan nasib ini kemudian menjadi landasan awal tumbuhnya semangat perlawanan terhadap kolonialisme. Di STOVIA, Abdul Muis juga merasakan langsung diskriminasi yang dilakukan pemerintah kolonial. Mahasiswa non-Kristen, termasuk dirinya, dilarang mengenakan pakaian ala Eropa dan diwajibkan memakai pakaian adat masing-masing. Hal ini mencerminkan upaya Belanda mempertahankan kekuasaannya melalui politik diskriminatif dan pecah belah (divide et impera), termasuk dalam bidang pendidikan.

Perjalanan karir Abdul Muis diawali dari latar belakang pendidikan yang tidak sepenuhnya selesai. Ia dikeluarkan dari STOVIA setelah menempuh pendidikan selama tiga tahun, karena ketidakmampuannya menghadapi darah dalam jumlah besar serta kesulitan mengikuti pelajaran praktik medis. Meskipun demikian, peristiwa tersebut tidak menghentikan semangat belajarnya. Sejak tahun 1903, ia mulai menjalani kehidupan mandiri dan menekuni pembelajaran secara otodidak .

Setelah gagal meraih gelar dokter, Abdul Muis berdiskusi dengan orang tuanya dan menerima nasihat untuk mencari pekerjaan sebagai pegawai. Berkat bantuan dari Mr. Abendanon, seorang tokoh Belanda, ia berhasil diterima sebagai pegawai di Departemen Eeredienst en Nijverheid, yang kemudian menjadi cikal bakal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di usia tujuh belas tahun, ia diangkat menjadi klerk, suatu jabatan yang cukup tinggi bagi bumiputera kala itu. Namun, dalam pekerjaannya, ia mengalami diskriminasi dari rekan kerja Indo-Belanda, terutama dalam hal gaji dan perlakuan atasan. Ketidakadilan ini memicu ketegangan, hingga akhirnya ia memutuskan keluar dari pekerjaannya pada

tahun 1905. Selepas keluar dari departemen tersebut, Abdul Muis menapaki karier di tiga bidang utama yang saling mendukung perjuangannya yaitu jurnalistik, politik, dan sastra.

a. Abdul Muis sebagai Jurnalis

Karier jurnalistik Abdul Muis dimulai pada tahun 1905 sebagai asisten editor di majalah Bintang Hindia, sebuah media berbahasa Melayu yang terbit di Amsterdam dan Jakarta, yang mengusung gagasan progresif serta mengkritik kolonialisme. Pada 1912, ia menjadi editor surat kabar Preanger Bode di Bandung, dan setahun kemudian diangkat sebagai pemimpin redaksi surat kabar Kaum Muda. Melalui media ini, Abdul Muis aktif menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah kolonial serta menyebarkan ide kemerdekaan dan keadilan sosial. Pada 1917, Abdul Muis juga terlibat mengelola Indische Stemmen. Setelah kembali dari Belanda pada 1918, ia menemukan Kaum Muda telah diambil alih oleh pihak konservatif dan digunakan sebagai alat propaganda. Sebagai respons, Abdul Muis mendirikan Kaum Muda Edisi Jakarta serta harian Neraca bersama tokoh pergerakan seperti Haji Agus Salim, di mana keduanya berperan sebagai pemimpin redaksi untuk melanjutkan perjuangan melalui media.

b. Abdul Muis sebagai Politikus

Abdul Muis mulai aktif di dunia politik pada tahun 1912 ketika bergabung dengan Sarekat Islam (SI) atas ajakan H.O.S. Cokroaminoto. Ia memanfaatkan pengalaman diskriminasi yang dialaminya sebagai pegawai pemerintah dan kemampuan jurnalistiknya untuk mengartikulasikan aspirasi rakyat pribumi. Bersama tokoh seperti Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat, ia menerjemahkan brosur “Als Ik een Nederlander Was” yang menjadi bentuk protes terhadap kolonialisme dan memicu penangkapan para aktivis Komite Bumiputera. Abdul Muis menjabat sebagai Wakil Ketua SI Cabang Bandung dan aktif menggunakan media sebagai alat propaganda politik, hingga akhirnya pada 1916 ia diangkat sebagai Wakil Presiden Central Sarekat Islam (CSI) hingga 1921.

Perang Dunia I dan dinamika politik global turut membentuk perjuangan politik Abdul Muis. Pada 1917, ia bersama Dwijosewoyo melakukan perjalanan ke Belanda untuk menyampaikan berbagai tuntutan rakyat, termasuk peningkatan pendidikan vokasional, reformasi agraria, penghapusan penyalahgunaan kekuasaan priyayi, serta kesetaraan antara pribumi dan warga Eropa. Di sana, ia juga menyaksikan kemewahan masyarakat Belanda yang berasal dari eksploitasi rakyat Indonesia, yang semakin menguatkan tekad perjuangannya. Pada tahun yang sama, Sarekat Islam mengajukan mosi menentang pemerasan rakyat pribumi, dan Abdul Muis aktif mengkritik ketidakadilan melalui berbagai saluran, meski sering menghadapi penahanan dari pemerintah kolonial. Setelah Perang Dunia I berakhir, tekanan politik dari tokoh seperti Abdul Muis berkontribusi pada pembentukan Volksraad pada 1918, meski lembaga ini hanya berfungsi sebagai badan penasihat dengan kekuasaan terbatas. Abdul Muis terpilih sebagai anggota Volksraad mewakili Jakarta dan dikenal sebagai bagian dari “trio oposisi” bersama Cokroaminoto dan Cipto Mangunkusumo. Ia secara vokal menuntut agar Volksraad berfungsi sebagai parlemen sejati yang mengawasi pemerintah. Pada 1919, ia menyampaikan pidato di Sulawesi yang menyoroti kerja paksa dan beban pajak, mengajak rakyat untuk bergabung dalam perjuangan keadilan sosial.

Pada awal 1920-an, Abdul Muis menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua Persatuan Pegawai Pegadaian Bumiputera dan memimpin aksi pemogokan besar menentang diskriminasi terhadap pegawai pribumi. Namun, ketegangan internal Sarekat Islam dan kegagalan pemogokan di Yogyakarta pada 1923 menyebabkan turunnya dukungan politik kepadanya, bahkan dari tokoh seperti Cokroaminoto. Akibatnya, Abdul Muis memilih mundur dari dunia politik, menandai berakhirnya babak penting dalam perjalanan perjuangannya.

c. Abdul Muis Sebagai Sastrawan

Abdul Muis memutuskan untuk meninggalkan dunia politik pada tahun 1925 dan

beralih ke dunia sastra. Keputusan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti konflik internal dengan H.O.S. Cokroaminoto mengenai pengaruh komunis di Sarekat Islam, kurangnya dukungan terhadap langkah politiknya, serta tindakan represif dari pemerintah kolonial. Pada awal tahun 1924, ia ditangkap dan diasingkan dari Sumatera Barat dengan larangan tinggal di luar Pulau Jawa, atas tuduhan menghambat penyelesaian masalah pajak tanah, tuduhan yang menuai kecaman dari berbagai media di Sumatera Barat.

Setelah pengasingan dan kegagalan politik, Abdul Muis menetap di Wanaraja, Garut, dan mulai fokus menulis. Ketertarikannya terhadap dunia tulis-menulis telah lama tumbuh seiring keterlibatannya dalam dunia politik. Beberapa karyanya antara lain Surapati (1905), Robert Anak Surapati (1915), Cindur Mato (1924), Salah Asuhan (1928), serta beberapa karya terjemahan seperti Tom Sowyer dan Tjut Nya Dien. Produktivitasnya membuktikan bahwa ia adalah seorang sastrawan yang gigih dalam menyuarakan gagasan melalui tulisan. Namun, dunia sastra saat itu tidak bebas dari pengawasan pemerintah kolonial. Sejak Nota Rinkes diterbitkan tahun 1911, karya-karya sastra harus memenuhi syarat ketat, seperti tidak menyinggung keamanan atau bertentangan dengan kebijakan kolonial. Balai Pustaka sebagai penerbit utama berada di bawah pengaruh pemerintah kolonial, menyaring tulisan yang dianggap berbahaya atau mengandung propaganda. Kondisi ini mendorong para sastrawan, termasuk Abdul Muis, untuk menyamarkan kritik mereka agar bisa lolos dari sensor.

Abdul Muis dikenal cerdas dalam menyampaikan kritik terhadap kolonialisme. Ia menggunakan gaya penulisan yang penuh sindiran, ironi, dan humor untuk menyampaikan pesan secara tersirat. Pengalaman pribadinya sebagai bumiputera yang mengalami diskriminasi turut memperkuat tema-tema emansipasi dan kesadaran sosial dalam tulisannya. Strategi penyampaian seperti ini membuat tulisannya tidak mudah terkena sensor kolonial, namun tetap memberikan dampak kuat kepada pembaca. Novel Salah Asuhan (1928) merupakan karya Abdul Muis yang paling dikenal luas. Novel ini mengangkat konflik budaya antara Barat dan Timur serta dampak pendidikan kolonial terhadap jati diri masyarakat pribumi. Tokoh utama, Hanafi, mengalami keterasingan budaya akibat pengaruh pendidikan Barat. Novel ini juga menggambarkan diskriminasi berdasarkan ras dan gender, serta menyoroti bagaimana kolonialisme menghancurkan nilai-nilai lokal. Melalui novel ini, Abdul Muis menyampaikan pesan perlawanan terhadap penjajahan.

Karya lainnya seperti Robert Anak Surapati juga memuat kritik terhadap kolonialisme dengan menyoroti dilema identitas dan loyalitas tokoh utama. Robert, yang berdarah campuran, menghadapi konflik batin antara membela ayah kandungnya Surapati atau setia kepada tentara kompeni. Tema ini merefleksikan isu pascakolonial dan perjuangan identitas dalam masyarakat jajahan. Abdul Muis wafat pada 1 Juni 1959 di Bandung dan dimakamkan dengan upacara kenegaraan. Atas jasa-jasanya, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Sukarno melalui Keputusan Presiden No. 218 Tahun 1959.

2. Kebijakan Politik Pemerintah Hindia Belanda Awal Abad ke-20

Memasuki awal abad ke-20, Pemerintah Hindia Belanda mulai melakukan reformasi dalam kebijakan kolonialnya. Perubahan ini merupakan respons terhadap berbagai kritik dan tekanan yang berkembang sejak pertengahan abad ke-19 terhadap sistem tanam paksa (cultuurstelsel) yang diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch pada tahun 1830. Sistem ini mewajibkan petani menanam tanaman ekspor seperti tebu dan kopi demi kepentingan Belanda. Akibatnya, produksi padi menurun, ketersediaan air untuk pertanian terganggu, dan rakyat mengalami kelaparan, kemiskinan, serta wabah penyakit yang meluas. Angka kematian meningkat drastis sebagai dampak eksploitasi tersebut.

Kritik keras terhadap sistem ini muncul baik dari kalangan intelektual Eropa maupun tokoh pribumi. Eduard Douwes Dekker melalui novelnya Max Havelaar (1860), dan Fransen van der Putte lewat tulisan Suikercontracten, menyuarakan penderitaan rakyat dan mengecam ketidakadilan kolonial. Tulisan-tulisan ini menjadi katalis perubahan opini

publik di Belanda, yang kemudian memengaruhi arah kebijakan pemerintahan kolonial.

Van Deventer, seorang tokoh liberal yang pernah tinggal di Hindia Belanda, menulis artikel berjudul Een Eereschuld (Hutang Kehormatan) pada tahun 1899 dalam jurnal De Gids. Ia menyatakan bahwa Belanda memiliki hutang moral kepada rakyat Indonesia akibat eksploitasi ekonomi berkepanjangan. Gagasan Van Deventer menekankan pentingnya peralihan dari sistem eksploitasi ke arah perbaikan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang lebih manusiawi.

Gagasan ini kemudian menemukan momentumnya ketika Ratu Wilhelmina, dalam pidato kenegaraannya tahun 1901, menyatakan bahwa Belanda berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di tanah jajahan. Pidato ini menjadi tonggak pengesahan kebijakan baru yang dikenal sebagai Politik Etis (Ethical Policy), sebuah pendekatan kolonial yang menggabungkan misi kemanusiaan dengan kepentingan ekonomi kolonial.

Politik Etis secara formal diterapkan mulai tahun 1901 hingga pendudukan Jepang pada 1942. Kebijakan ini didasarkan pada tiga pilar utama yang dikenal sebagai Trias Van Deventer :

a. Irigasi, pembangunan infrastruktur pertanian, seperti sistem irigasi dan bendungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian rakyat;
b. Emigrasi, mendorong transmigrasi penduduk dari Jawa yang padat ke daerah luar Jawa untuk pemerataan penduduk dan tenaga kerja;
c. Edukasi, menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat pribumi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Namun, dalam implementasinya, terdapat penyimpangan. Pembangunan irigasi lebih menguntungkan perkebunan kolonial, emigrasi kerap dijalankan sebagai program kerja paksa di perkebunan milik Belanda, dan pendidikan hanya diberikan kepada kalangan elit dan priyayi.

3. Dampak Politik Etis terhadap Masyarakat Pribumi

Meski sering dipandang sebagai kebijakan yang lebih “berperikemanusiaan”, politik etis tetap bersifat ambivalen. Di satu sisi, ia membuka jalan bagi kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Banyak sekolah didirikan, rumah sakit dibangun, dan irigasi diperluas. Hal ini memperbaiki tingkat melek huruf dan memperluas akses layanan publik. Di sisi lain, struktur sosial tetap timpang karena akses terhadap pendidikan dan layanan publik lebih mudah dijangkau oleh elit lokal. Namun, dari kalangan inilah muncul generasi intelektual yang kemudian menjadi pelopor pergerakan nasional Indonesia. Lulusan lembaga pendidikan seperti STOVIA, OSVIA, dan sekolah pertanian menjadi tulang punggung organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij. Pendidikan yang dihadirkan melalui politik etis, walaupun terbatas, menumbuhkan kesadaran politik di kalangan pemuda pribumi. Surat kabar seperti Medan Prijaji menjadi media aspirasi kaum terpelajar, dan wacana kebangsaan mulai berkembang. Politik Etis, meski bertujuan menjaga stabilitas kolonial, justru mempercepat lahirnya kesadaran nasionalisme Indonesia.

Kebijakan Politik Asosiasi muncul sebagai respons terhadap kegagalan pendekatan represif kolonial Belanda dalam menekan berbagai gejolak sosial dan pemberontakan di Hindia Belanda. Pergeseran ini juga didorong oleh menguatnya pemikiran liberal dan humanis di Belanda yang menuntut tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan penduduk jajahan. Dalam konteks ini, Snouck Hurgronje seorang orientalis dan penasihat pemerintah kolonial dalam urusan Islam mengusulkan pendekatan baru yang dikenal sebagai Politik Asosiasi. Pendekatan ini berorientasi pada pendidikan bergaya Barat dan asimilasi budaya antara elite pribumi dan budaya Eropa. Politik Asosiasi menjadi salah satu pilar penting dalam implementasi Politik Etis awal abad ke-20, khususnya dalam bidang pendidikan.

Politik Asosiasi muncul sebagai respons atas kegagalan pendekatan represif pemerintah kolonial Belanda dan dipengaruhi oleh pemikiran liberal serta humanis yang

menuntut perhatian terhadap kesejahteraan penduduk jajahan. Snouck Hurgronje mengusulkan pendekatan ini dengan menitikberatkan pada pendidikan bergaya Barat serta asimilasi budaya antara elite pribumi dan budaya Eropa. Kebijakan ini ditujukan khusus kepada elite pribumi yang dianggap potensial untuk diintegrasikan ke dalam sistem kolonial sebagai agen perubahan yang loyal, dengan upaya menjauhkan mereka dari pengaruh Islam dan tradisi lokal agar menjadi pemimpin yang rasional dan sekuler.

Dalam pelaksanaannya, Politik Asosiasi menciptakan sistem pendidikan yang diskriminatif, mengutamakan anak-anak bangsawan dan elite adat dengan kurikulum berbeda berdasarkan ras dan kelas sosial. Pendidikan digunakan sebagai alat untuk memperkuat jarak sosial antara elite dan rakyat biasa serta mengendalikan pengaruh Islam yang dianggap mengancam stabilitas kolonial. Meskipun bertujuan membentuk elite kooperatif, pendidikan Barat justru melahirkan kelompok intelektual yang kritis terhadap ketimpangan sosial dan penindasan kolonial, menjadi awal mula munculnya gerakan nasionalis.

Dampak tak terduga dari Politik Asosiasi adalah munculnya kelompok intelektual modern yang aktif dalam memperjuangkan hak rakyat pribumi di bidang politik, sosial, dan budaya. Tokoh-tokoh seperti Agus Salim menjadi contoh bagaimana pendidikan kolonial memicu kesadaran keislaman dan nasionalisme. Seiring bertambahnya kaum terpelajar, kesadaran kolektif terhadap diskriminasi dan ketidakadilan kolonial meningkat, memicu lahirnya organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. Dengan demikian, pendidikan Barat yang awalnya dimaksudkan untuk mengokohkan kekuasaan kolonial justru menjadi alat emansipasi dan pemicu perjuangan kemerdekaan.

4. Pembentukan Volksraad

Pembentukan Volksraad tidak dapat dipisahkan dari konteks Politik Etis yang berjanji memperbaiki nasib rakyat pribumi melalui pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Selain itu, situasi global yang dipengaruhi oleh Perang Dunia I memicu kekhawatiran pemerintah kolonial Belanda akan ancaman invasi asing, sementara kekuatan militer di Hindia Belanda masih lemah. Untuk memperkuat pertahanan, pemerintah membentuk Komite Indië Weerbaar yang bertujuan melibatkan penduduk pribumi dalam milisi lokal (Inlandsche Militie), namun ide ini mendapat penolakan karena rakyat pribumi merasa tidak memiliki keterikatan dengan tanah jajahan tersebut.

Masyarakat pribumi mulai menuntut hak pendidikan dan politik yang lebih luas, tetapi pemerintah kolonial justru memandang tuntutan itu sebagai provokasi. Pada 1917, Gubernur Jenderal van Limburg Stirum menjanjikan pembentukan Volksraad sebagai dewan penasihat legislatif. Namun, janji ini mengecewakan kalangan pergerakan nasional karena Volksraad tidak memiliki kekuasaan legislatif nyata, hanya berfungsi sebagai penasihat semata. Perdebatan terkait milisi pribumi juga berlangsung sengit, dengan tokoh kiri seperti Sneevliet dan Tjipto Mangunkusumo menolak keras pembentukan milisi tersebut karena dianggap alat penjajah.

Sebagian tokoh pergerakan nasional, termasuk Abdul Muis, melihat Komite Indië Weerbaar sebagai kesempatan strategis untuk menuntut hak politik pribumi. Dalam Kongres Sarekat Islam 1916, Muis menggunakan isu pertahanan untuk menuntut pendidikan layak, hak politik lebih besar, dan kesetaraan hukum. Ia bahkan mengajukan proposal agar rakyat yang diminta membela tanah jajahan harus memiliki representasi politik yang sah melalui parlemen, menegaskan bahwa keterlibatan dalam pertahanan harus didasari rasa memiliki terhadap tanah air.

Pada tahun 1917, Abdul Muis dan Dwijosewoyo dari Budi Utomo mengunjungi Belanda untuk menyampaikan aspirasi rakyat Hindia Belanda langsung kepada Ratu Belanda. Mereka mengajukan tuntutan peningkatan pendidikan vokasional, dukungan koperasi, perbaikan irigasi, penghapusan penyalahgunaan kekuasaan priyayi, reformasi hukum agraria, dan pembentukan parlemen sejati. Namun, hasil kunjungan tersebut hanya

janji samar tanpa tindakan konkret; pembentukan milisi pribumi tetap ditolak, dan parlemen yang dijanjikan tidak memiliki kewenangan berarti.

Undang-undang pembentukan Volksraad disahkan pada Desember 1916 dan lembaga ini resmi berdiri pada Mei 1918. Volksraad berfungsi sebagai badan penasihat dengan kewenangan terbatas, dengan anggota sebagian diangkat dan sebagian dipilih melalui sistem pemilihan sangat terbatas. Hal ini jauh dari harapan para tokoh pergerakan seperti Sarekat Islam dan Boedi Oetomo yang menginginkan parlemen demokratis sejati. Meski kekuasaan Volksraad terbatas, keberadaannya menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan politik Indonesia. Lembaga ini membuka ruang bagi kaum terpelajar pribumi untuk menyuarakan aspirasi mereka secara formal dan menjadi langkah awal menuju pembentukan parlemen sejati (volwaardig parlement) dalam kerangka demokrasi parlementer di masa depan.

5. Respon Organisasi Pergerakan Terhadap Pembentukan Volksraad

Pembentukan Volksraad (Dewan Rakyat) oleh pemerintah kolonial Belanda merupakan respons terhadap dinamika politik global dan domestik, khususnya setelah Perang Dunia I. Lembaga ini dimaksudkan sebagai bentuk keterbukaan politik dalam rangka pelaksanaan Politik Etis. Namun, Volksraad hanya berperan sebagai badan penasihat tanpa kekuasaan legislatif sejati. Fungsi legislatifnya terbatas dan sebagian anggotanya tidak dipilih secara demokratis, menjadikan lembaga ini tidak sebanding dengan parlemen dalam sistem demokrasi modern. Meskipun demikian, Volksraad memberikan ruang yang relatif aman bagi tokoh pergerakan untuk menyuarakan aspirasi tanpa ancaman langsung dari tindakan represif.

Wacana pembentukan Volksraad memicu respons yang beragam dari organisasi-organisasi pergerakan di Indonesia. Sebagian melihatnya sebagai peluang strategis, sementara yang lain menganggapnya sebagai kompromi yang melemahkan perjuangan kemerdekaan. Berikut ini adalah tanggapan beberapa organisasi pergerakan terhadap pembentukan Volksraad.

a. Regentenbond (Ikatan Para Bupati)

Regentenbond menunjukkan sikap proaktif sejak awal pembahasan pembentukan Volksraad. Pada tahun 1915, Achmad Djajadiningrat, Bupati Serang, atas nama Regentenbond mengajukan usulan pembentukan milisi bumiputera dan badan perwakilan rakyat yang memiliki kewenangan untuk memberi saran, mengawasi, serta meminta pertanggungjawaban pemerintah kolonial. Usulan ini mencerminkan harapan elit priyayi untuk memperluas partisipasi politik pribumi dalam sistem kolonial.

b. Budi Utomo

Budi Utomo, sebagai pelopor organisasi modern, mulai menunjukkan ketertarikan pada ranah politik. Dalam rapat umum di Bandung (5–6 Agustus 1915), organisasi ini menyatakan dukungan terhadap wajib militer bagi pribumi, dengan syarat pembentukan Dewan Rakyat harus menjadi prioritas utama. Dengan dukungan Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum, Budi Utomo melihat Volksraad sebagai pintu masuk untuk memperjuangkan hak rakyat pribumi melalui jalur politik. Transformasi orientasi dari pendidikan ke politik memperkuat posisi Budi Utomo di mata rakyat.

c. Sarekat Islam (SI)

Sikap Sarekat Islam terhadap Volksraad cukup kompleks. Di satu sisi, organisasi ini melihat Volksraad sebagai peluang untuk menyuarakan kepentingan rakyat, bahkan mengusulkan pembentukan dewan-dewan daerah dan perluasan kewenangan legislatif Volksraad. Namun, dalam Kongres Nasional II (Batavia, 1917), terjadi perpecahan pandangan: Abdul Muis mendukung partisipasi, sementara Semaun menolaknya sebagai "pertunjukan kosong". Tokoh seperti Salim, yang awalnya mendukung, kemudian mengecam Volksraad sebagai "komedi omong". Meski begitu, Central Sarekat Islam (CSI) tetap memilih berpartisipasi dan mengajukan perwakilan dalam Volksraad sebagai bentuk perjuangan politik strategis.

d. Indische Partij (IP) dan ISDV

Indische Partij menyambut baik pembentukan Volksraad sebagai langkah awal integrasi rakyat pribumi ke dalam sistem pemerintahan kolonial, meski dalam kerangka terbatas. Sebaliknya, Indische Social Democratische Vereniging (ISDV) yang berhaluan sosialis dan radikal, menolak Volksraad secara tegas. Mereka menganggapnya sebagai alat legitimasi kolonialisme yang tidak akan membawa perubahan berarti.

e. Sikap Pemerintah Kolonial

Sikap pemerintah kolonial Belanda sendiri juga terbelah. Kelompok etis mendukung pembentukan Volksraad karena melihatnya sebagai sarana partisipasi pribumi dan perbaikan hubungan pemerintah dengan masyarakat. Sebaliknya, kelompok konservatif menolak keras, karena khawatir akan mengganggu dominasi Belanda di Hindia Timur. Mereka melihat partisipasi pribumi dalam pemerintahan sebagai ancaman terhadap kelangsungan kekuasaan kolonial.

6. Bentuk Politik Abdul Muis dalam Volksraad Tahun 1918–1921

Pembentukan Volksraad oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1918 merupakan upaya untuk memberikan ruang partisipasi terbatas kepada kaum pribumi dalam pemerintahan. Volksraad hanyalah sebuah badan penasihat yang tidak memiliki kekuasaan legislatif, tetapi menjadi salah satu jalur formal perjuangan politik pada masa itu. Abdul Muis, yang terpilih sebagai anggota Volksraad mewakili golongan wartawan untuk periode 1918–1921, memanfaatkan posisi ini sebagai media perjuangan aspiratif bagi rakyat Indonesia. Dalam Volksraad, Abdul Muis dikenal sebagai tokoh yang vokal menyuarakan kritik terhadap ketidakadilan sosial dan kebijakan pemerintah kolonial yang merugikan masyarakat pribumi. Ia mengangkat isu-isu penting seperti pendidikan, kesejahteraan sosial, dan hak politik. Ia juga memperjuangkan tuntutan Sarekat Islam yang sebelumnya telah dirumuskan dalam kongres-kongres organisasi tersebut.

Strategi politik Abdul Muis dapat dikategorikan sebagai kooperatif-progresif, yaitu memilih untuk bergerak dalam sistem resmi yang dibentuk pemerintah kolonial, dengan harapan mendorong perubahan dari dalam. Berbeda dari tokoh lain yang mengambil pendekatan konfrontatif atau radikal, Abdul Muis percaya bahwa jalur institusional dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan reformasi sosial dan politik. Sikap ini menunjukkan keyakinannya bahwa legalisme politik masih bisa digunakan sebagai alat perjuangan, meski terbatas.

Kebijakan kolonial yang tidak responsif terhadap kelaparan besar pada tahun 1917 menjadi sorotan tajam dalam sidang-sidang Volksraad. Ketika India-Inggris menghentikan ekspor beras ke Hindia Belanda, harga beras melonjak hingga lima kali lipat. Sementara itu, pemerintah kolonial cenderung mengabaikan kondisi ini dan tetap menyatakan bahwa persediaan pangan mencukupi, meskipun kenyataan di lapangan sangat berbeda. Dalam sidang Dewan Rakyat tahun 1918 yang membahas krisis kelaparan, Abdul Muis tampil sebagai sosok kritis. Ia secara tegas menyatakan “Rakyat lapar!” sebagai bentuk protes terhadap kelambanan dan ketidakpedulian pemerintah. Pernyataan ini menunjukkan keberpihakan Abdul Muis kepada rakyat kecil dan komitmennya dalam memperjuangkan keadilan sosial melalui forum legislatif resmi.

Keterbatasan wewenang Volksraad menyadarkan Abdul Muis dan tokoh nasionalis lainnya akan pentingnya membentuk aliansi untuk memperkuat posisi oposisi. Bersama tokoh-tokoh seperti Dr. Cipto Mangunkusumo dan H.O.S. Tjokroaminoto, Abdul Muis membentuk fraksi Radicale Concentratie, yang menjadi kekuatan oposisi dalam Volksraad. Fraksi ini menuntut reformasi menyeluruh, termasuk mengubah Volksraad menjadi parlemen sejati yang memiliki wewenang legislatif dan pemerintah yang bertanggung jawab kepadanya. Trio oposisi ini dikenal karena pidato-pidato berani mereka yang menuntut perluasan hak politik dan demokratisasi sistem pemerintahan. Namun, harapan tersebut tidak terealisasi karena kekuasaan Volksraad tetap dibatasi, dan Gubernur Jenderal masih memiliki hak veto serta wewenang untuk merujuk kebijakan ke Ratu Belanda.

Kehadiran Abdul Muis sebagai anggota Volksraad juga memiliki dampak signifikan di daerah, terutama di Padang. Dalam pidatonya di sana, ia mengangkat isu kerja rodi (kerja paksa) sebagai salah satu bentuk ketidakadilan sistem kolonial. Dengan kemampuan retorika yang kuat, Abdul Muis mampu menggugah kesadaran politik masyarakat dan memperluas dukungan terhadap perjuangan pergerakan nasional.

Pemerintah kolonial, melalui pernyataan resmi yang dibacakan oleh Mr. Talma pada 18 November 1918, menekankan perlunya percepatan kebijakan sebagai respons terhadap dinamika global. Pemerintah menyatakan keinginan untuk bekerja sama lebih erat dengan Volksraad dalam menciptakan perubahan, namun tanpa menjelaskan secara konkret batasan dan bentuk perubahan yang akan dilakukan.

Ketidakjelasan ini mendorong H.O.S. Tjokroaminoto mengajukan sebuah mosi penting pada 25 November 1918. Mosi ini ditandatangani oleh sejumlah tokoh pergerakan, termasuk Abdul Muis, Sastrowidjono, Dwidjosewojo, Cramer, Tjipto Mangunkusumo, Radjiman, Teeuwen, dan Thajeb, yang menunjukkan kekompakan mereka dalam menuntut perubahan sistem pemerintahan yang demokratis.

7. Gagasan politik Abdul Muis dalam Volksraad

Abdul Muis merupakan tokoh pergerakan nasional yang aktif di Volksraad pada periode 1918–1921. Ia menggunakan posisinya di lembaga tersebut untuk menyuarakan aspirasi rakyat pribumi dan mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang merugikan masyarakat. Melalui strategi politik kooperatif, Abdul Muis mengusulkan berbagai reformasi di bidang politik, ekonomi, dan sosial, termasuk perluasan hak politik dan pembentukan lembaga perwakilan yang lebih demokratis. Pemikirannya menunjukkan komitmennya terhadap keadilan sosial dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan.

Salah satu kontribusi penting Abdul Muis adalah perannya dalam Mosi Sarekat Islam 1918 yang menuntut diakhirinya penindasan oleh kaum priyayi dan Eropa serta pembentukan badan perwakilan rakyat dalam bidang pertahanan. Muis memanfaatkan Volksraad sebagai sarana legal untuk memperjuangkan hak-hak rakyat melalui jalur parlementer. Ia memandang Volksraad sebagai langkah awal menuju otonomi politik meskipun menyadari keterbatasannya sebagai lembaga yang masih berada di bawah kendali kolonial. Abdul Muis juga mengusulkan pembentukan media resmi Volksraad pada tahun 1919 untuk menyampaikan informasi akurat dan menghindari distorsi berita dari surat kabar umum. Ia menginginkan agar media tersebut menjadi wadah kritik bagi semua golongan serta membela kelompok lemah. Gagasan ini mencerminkan pentingnya keterbukaan informasi dan representasi yang adil dalam proses politik serta memperkuat transparansi lembaga perwakilan.

Di bidang ekonomi dan ketahanan pangan, Abdul Muis mengajukan mosi pengalihan 25% lahan tebu untuk penanaman padi sebagai respons terhadap krisis pangan dan dominasi kebijakan kolonial yang lebih menguntungkan kepentingan asing. Ia juga memperjuangkan pendirian sekolah teknik, yang kini dikenal sebagai ITB, dengan menekankan pentingnya pendidikan tinggi teknik bagi pribumi sebagai dasar kemajuan dan kesiapan menghadapi tantangan modern. Pada tahun 1921, Abdul Muis mengusulkan perluasan kewenangan Volksraad agar menjadi badan legislatif yang sejati serta mendorong pembentukan dewan daerah. Ia juga mengajukan usulan hak pilih bagi warga berusia 18 tahun untuk dewan desa dan 20 tahun untuk dewan lainnya, dengan syarat mampu membaca, menulis, dan memahami bahasa Melayu. Usulan ini bertujuan memperluas partisipasi masyarakat dalam sistem politik kolonial dan menjadi cikal bakal gerakan demokratisasi di Indonesia.

8. Respon Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Gagasan Politik Abdul Muis

Abdul Muis merupakan tokoh nasionalis yang aktif memperjuangkan hak-hak rakyat pribumi melalui keterlibatannya di Volksraad dengan mengajukan berbagai gagasan progresif, seperti perluasan hak politik dan pembentukan lembaga perwakilan yang lebih

demokratis. Namun, pemerintah Hindia Belanda tidak selalu merespon perjuangan tersebut secara positif. Mereka kerap bersikap represif dan membatasi ruang gerak kaum nasionalis yang menuntut perubahan sistem kolonial. Salah satu contoh adalah mosi Sarekat Islam tahun 1918 yang menuntut pembentukan badan perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat dan kritik terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah. Pemerintah merespon dengan pengawasan ketat dan penahanan tokoh Sarekat Islam untuk menjaga stabilitas kolonial. Pada isu media pers independen sebagai sarana representasi Volksraad, Abdul Muis mengusulkan agar ada media resmi yang dapat menjangkau masyarakat luas agar publik bisa memahami perdebatan politik. Namun, pemerintah kolonial menolak usulan ini karena khawatir media tersebut akan memicu agitasi massa dan meningkatkan nasionalisme yang mengancam kekuasaannya. Pemerintah juga melakukan berbagai tindakan represif seperti penggerebekan rumah aktivis dan pembatasan kebebasan pers sebagai strategi mengendalikan arus informasi dan melemahkan gerakan nasionalis dalam Volksraad.

Dalam hal kepentingan petani pribumi, terutama pada industri tebu, pemerintah Hindia Belanda menunjukkan sikap yang kurang mendukung. Sistem tanam paksa yang diberlakukan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi kolonial tanpa memperhatikan kesejahteraan petani. Usulan Abdul Muis untuk memperjuangkan hak petani pribumi dalam industri tebu mendapat penolakan mayoritas di Volksraad. Hal ini menimbulkan kritik dari beberapa tokoh pribumi yang menilai perjuangan tersebut kurang efektif, meskipun tokoh lain membela usaha Abdul Muis sebagai perjuangan konsisten di tengah pembatasan kolonial.

Di sisi lain, usulan Abdul Muis mengenai pendirian sekolah teknik di Indonesia mendapat respons positif dari pemerintah kolonial. Pada tahun 1920, didirikan Technische Hooge School di Bandung (cikal bakal ITB) sebagai wujud nyata dari aspirasi pendidikan teknik pribumi. Meski demikian, pemerintah tetap mengontrol pelaksanaan pendidikan, termasuk kurikulum dan jumlah mahasiswa, sehingga lembaga ini tetap beroperasi dalam kerangka kepentingan kolonial.

Respon pemerintah terhadap gagasan perluasan kewenangan Volksraad dan hak pilih bagi bumiputera cenderung menolak dan membatasi. Pemerintah mempertahankan kontrol ketat atas lembaga ini, dengan mengendalikan proses pemilihan anggota dan membatasi ruang kebebasan politik pribumi. Meskipun ada semangat Politik Etis yang memberikan ruang partisipasi politik, kontrol kolonial yang ketat menyebabkan Volksraad gagal menjadi representasi sejati rakyat pribumi. Sistem pemilihan yang terbatas dan pembatasan hak bicara membuat pengaruh kaum nasionalis tetap kecil dan terbatas.

Secara keseluruhan, respons pemerintah Hindia Belanda terhadap gagasan-gagasan Abdul Muis mencerminkan dominasi kolonial yang bertujuan mempertahankan kekuasaan dan stabilitas. Pemerintah mengakomodasi tuntutan pribumi secara terbatas dan selektif, terutama bila terkait kepentingan ekonomi atau pendidikan yang tidak mengancam dominasi mereka. Namun, dalam aspek politik dan sosial-ekonomi, pemerintah lebih memilih pembatasan dan tindakan represif untuk mengekang gerakan nasionalis dan aspirasi rakyat pribumi.

SIMPULAN

Abdul Muis merupakan tokoh penting dalam perjuangan nasional Indonesia yang berperan di bidang politik, sastra, dan jurnalistik. Lahir dari keluarga terpandang di Minangkabau, ia mengembangkan bakatnya dalam berdebat dan perjuangan melalui Sarekat Islam serta aktivitas di Volksraad, memperjuangkan hak-hak rakyat pribumi, terutama dalam bidang pendidikan dan penghapusan kerja rodi. Meski menghadapi tekanan kolonial, Abdul Muis berhasil membangun kesadaran nasionalisme yang menjadi pondasi gerakan kemerdekaan Indonesia, serta menghasilkan karya sastra yang kritis terhadap ketidakadilan kolonial.

Di sisi lain, kebijakan Politik Etis yang diterapkan Pemerintah Hindia Belanda pada

awal abad ke-20 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pribumi melalui program irigasi, emigrasi, dan pendidikan, pada kenyataannya lebih banyak menguntungkan kepentingan kolonial dan memperkuat ketimpangan sosial-ekonomi. Pendidikan yang diupayakan melalui Politik Asosiasi memang melahirkan kaum terpelajar yang menjadi motor penggerak kesadaran nasional, namun tingkat literasi masyarakat pribumi secara umum masih rendah. Dengan demikian, meskipun Politik Etis membawa beberapa manfaat, kebijakan ini gagal secara signifikan dalam menciptakan perubahan yang adil dan merata bagi rakyat Indonesia di bawah penjajahan Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazali. Al-Mustasfa fi Ilm al-Usul. Beirut: Dar al-Kutub, t.t.

Al-Khudari, Muhammad. Taisir al-Fiqh al-Islami. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 2000.

Asy-Syatibi, Ibrahim bin Musa. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah. Jilid 1. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1996.

Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.

Esposito, John L. What Everyone Needs to Know About Islam. Oxford: Oxford University Press, 2011.

Ibn Qudamah. Al-Mughni. Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Kamali, M. H., Shariah Law: An Introduction, 2008, hlm. 137.

Modood, Tariq, Anna Triandafyllidou, dan Ricard Zapata-Barrero, eds. Multiculturalism, Muslims and Citizenship: A European Approach. London: Routledge, 2006.

Pew Research Center. “Discrimination Against Muslims in Western Europe.” 2020.
https://www.pewresearch.org/religion/

Qaradawi, Yusuf al-. Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Daw’ al-Qur’an wa al-Sunnah. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.

Zuhayli, Wahbah al-. Ushul al-Fiqh al-Islami. Jilid 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986. Amalia, R. (2016). Kebijakan politik asosiasi pendidikan kolonial terhadap umat Islam tahun 1890–1930 (Skripsi, Universitas tidak disebutkan).

Apriyana, S. B., Komariyah, S., & Novriyanto, Y. (2022). Pengaruh kebijakan politik etis terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial, 1(1), 89.

Azmi, D. (1984). Abdul Muis. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Djaelani, A. T. (2017). Gerakan Sarekat Islam: Kontribusi pada nasionalisme Indonesia. Jakarta: LP3S.

Djodygondokusumo, Mr., & Amelz. (1961). Parlemen Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang.

Gie, S. H. (1999). Di bawah lentera merah. Yogyakarta: Edi Cahyono’s Experience.

Harun, C., Hetreda, T., & Dasforsate, A. (2023). Organisasi pemuda masa pergerakan nasional Indonesia (1908–1928). Jurnal Pendidikan Sejarah, 3(2), 459–461.

Ichsan, M., & Maulia, S. T. (2023). Budi Utomo: Pemantik pergerakan nasional. Jurnal Edu Sosial, 3(1), 98–99.

Khabib, M. N., Ruslan, A., & Bandarsyah, D. (2021). Transformasi pendidikan dan perubahan sosial-budaya pada masa pergerakan nasional. Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora, 5(2), 176.

Kuntowijoyo. (2018). Ilmu pengantar sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Kurniawan, D. (2014). Peranan Volksraad dalam perkembangan pendidikan politik masyarakat pribumi di Hindia Belanda tahun 1916–1942 (Skripsi, Universitas tidak disebutkan).

Maftuhin, S., & Umamah, N. (2017). The movement of Sarekat Islam's politics in struggling national independence in 1918–1945. Jurnal Historica, 1(2), 244–245.

Muis, A. (2010). Robert Anak Surapati (Cet. ke-16). Jakarta: Balai Pustaka.

Muhasabah, N., Subaryana, & Jurahman, Y. B. (2021). Politik etis dan pengaruhnya terhadap perkembangan politik di Hindia Belanda. Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah, 2(1), 13–14.

Noer, D. (1980). Gerakan moderen Islam di Indonesia 1900–1942. Jakarta: LP3ES.

Nur, B. M. (1978). Abdoel Muis, politikus, jurnalis, sastrawan. Jakarta: Mutiara.

Poeze, H. A. (2008). Di negeri penjajah: Orang Indonesia di negeri Belanda 1600–1950. Jakarta: KITLV.

Rafiqoh, S., et al. (2023). Pengaruh politik etis kolonial Belanda terhadap pertanian dan ekonomi lokal di Lampung. The Indonesian Journal of Social Studies, 6(2), 23, 28.

Ricklefs, M. C. (1991). Sejarah modern Indonesia (D. Hardjowidjono, Trans.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Salma, R., et al. (2023). Pengaruh politik etis kolonial Belanda terhadap pertanian dan ekonomi lokal di Lampung. The Indonesian Journal of Social Studies, 6(2), 23, 28.
Simarmata, D. N. A. (n.d.). The role of the Volksraad in the Dutch East Indies period. Holistic Science, 4(...), halaman tidak tersedia.
Sitorus, M. S. M. (2023). Surat kabar Medan Prijaji: Media aspirasi rakyat pribumi dan pemantik kesadaran edukasi. JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah, 3(2), 5–6.
Sondarika, W. (2019). Dampak cultuurstelsel (tanam paksa) bagi masyarakat Indonesia dari tahun 1830–1870. Jurnal Artefak, 3(1), 64–65.
Susilo, A. (2018). Politik etis dan pengaruhnya bagi lahirnya pergerakan bangsa Indonesia. Jurnal Historia, 6(2), 403–404.
Tyas Wukandari, D., Andarnuswari, N. D., & Cholis, N. (2013). Hindia Belanda dan Perang Dunia I 1914–1918 (Ed. terj.). Jakarta: KITLV.
Wahyuni, B., & Mursal, I. F. (2022). Analisis masa pergerakan nasional Indonesia 1908–1942. Jurnal Sejarah, 2(1), 64–65.
Zulkarnain. (2010). Serba-serbi tanam paksa. Istoria: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah, 8(1), 30.